IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 3 SIDOARJO

Vika Apriliani

15040254014 (PPKn, FISH, UNESA) vikaapriliani@mhs.unesa.ac.id

I Made Suwanda

0009075708 (PPKn, FISH, UNESA) madesuwanda@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo, mendeskripsikan hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, Observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi SKS diawali dengan kegiatan workshop kemudian dilanjutkan dengan MGMP. Selanjutnya pengaturan kelas dalam SKS disebut dengan istilah kelas heterogen. Pengelolaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) di SMA Negeri 3 Sidoarjo berbasis pada Layanan Individual. Sedangkan pengaturan beban belajar di dalam SKS menggunakan sistem paket. Kegiatan pembelajaran PPKn dengan SKS meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan pendahuluan diawali dengan pembacaan do'a sebelum belajar. Kegiatan inti menerapkan pendekatan saintifik 5M dengan dipadukan model pembelajaran yang sesuai, sedangkan untuk Peserta Didik Cepat Belajar kegiatan inti yaitu melakukan diskusi dengan kelompok belajarnya untuk mendiskusikan UKBM. Kegiatan penutup dengan memberikan kesimpulan materi yang telah disampaikan serta melakukan refleksi. 2) Hambatan dalam implementasi SKS pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo meliputi : a) Guru kesulitan membagi waktu. b) Guru kesulitan mengelola kelas. c) Pemahaman peserta didik tentang SKS masih rendah. 3) Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi SKS pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo meliputi : a) Memberikan tugas untuk mengerjakan UKBM. b) Mengelompokkan posisi duduk antara peserta didik reguler dengan PDCB di pisah. c) menggunakan pendekatan memberikan motivasi di sela-sela jam pelajaran.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Kredit Semester (SKS), Mata Pelajaran PPKn.

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Semester Credit System (SKS) in PPKn subjects at SMA Negeri 3 Sidoarjo, describing obstacles and efforts to overcome these obstacles. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques used were in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that: 1) Implementation of the Semester Credit System begins with workshop activities and holds MGMP. Furthermore, the class setting in the Semester Credit System is called the heterogeneous class term and the management of the Independent Learning Activity Unit (UKBM) in Sidoarjo 3 Public High School based on Individual Services. While setting the learning load in the SKS uses a package system. The learning activities of PPKn with SKS include introductory, core and closing activities. The preliminary activity begins with reading the prayer before learning. The core activity applies the 5M scientific approach by combining appropriate learning models, while for PDCB the core activities are conducting discussions with the study group to discuss UKBM. Closing activity by giving material conclusions that have been conveyed and reflecting. 2) Obstacles in the implementation of SKS in PPKn subjects at SMA Negeri 3 Sidoarjo include: a) Teachers have difficulty dividing time. b) The teacher has difficulty managing the class. c) Students' understanding of the Semester Credit System is still low. 3) Efforts in overcoming barriers to the implementation of credit in PPKn subjects at SMA Negeri 3 Sidoarjo include: a) Providing assignments to work on UKBM. b) Grouping the sitting position between regular students and PDCB separated. c) using a motivational approach between class hours.

Keywords: Implementation, Semester Credit System (SKS), PPKn Subject.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset bangsa yang menjadi modal dalam pembangunan bangsa Indonesia untuk dapat bertahan ditengah-tengah kemajuan zaman yang semakin pesat. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai bidang salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan bekal utama dan pertama dalam menghadapi kehidupan di masa sekarang. Melalui pendidikan akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing karena pendidikan

yang berkualitas akan menghasilkan output berupa sumber daya manusia yang berkualitas pula. Salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan peserta didik menjadi insan yang memiliki kemampuan akademik dan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam berinteraksi di masyarakat.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan kualitas pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan manusia. Kesadaran masyarakat inilah yang mendorong pemerintah untuk terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Nasional. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan. Mulai dari perubahan kurikulum yang dilakukan secara berkelanjutan serta disusul dengan perubahan penyelenggaraan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang baik ialah sistem pendidikan yang mampu mengakomodir perbedaan individual peserta didik. Karena tujuan pendidikan ialah mencerdaskan setiap individu berdasarkan bakat, minat dan kemampuannya.

Untuk mewujudkan itu semua perlu diusahakan suatu sistem pendidikan Nasional yang bermutu dan dapat membentuk manusia-manusia yang unggul dan memiliki daya saing global. Dalam peningkatan daya saing, dapat dilihat dari kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didiknya. Dengan kemampuan pengelolaan yang baik, maka pelaksanaan pendidikan pun diharapkan akan berjalan secara optimal, dengan demikian sekolah akan dapat berpartisipasi dalam membantu usaha peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dalam pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan haruslah memerhatikan perbedaan kecerdasan, kecakapan, bakat dan minat peserta didik. Oleh karena itu, sekolah harus mampu mengakomodir segala aspek yang ada di dalamnya termasuk aspek perbedaan individual peserta didik. Bukan hanya itu saja, peserta didik juga harus diberikan perlakuan maksimal untuk dapat mengaktualisasikan diri melalui berbagai potensi dalam hal intelektual, emosional dan spiritualnya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan sekolah demi mewujudkan keadilan bagi peserta didik dalam memperoleh pendidikan di mana

peserta didik yang memiliki potensi lebih, dapat belajar lebih cepat tanpa terhambat oleh temannya yang biasa saja, selain itu anak yang biasa saja pun tidak terganggu dengan anak yang memiliki kemampuan lebih tersebut.

Aunurrahman (2009:33) menyatakan bahwa setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain dan tidak satupun yang memiliki ciri-ciri yang sama. Setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu yang lainnya. Perbedaan individual ini merupakan kodrat manusia yang bersifat alami. Perbedaan individu tersebut disebabkan oleh besarnya variasi dalam kemampuan.

Salah satu inovasi pendidikan yang dilakukan untuk mengakomodir perbedaan individual peserta didik yaitu melalui penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Perubahan ini dilakukan karena sistem paket yang semula diterapkan dianggap kurang mampu mengakomodir kemajemukan peserta didik sehingga peserta didik tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kecepatan belajarnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 1 menyebutkan bahwa

“Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar”.

Gambaran umum Sistem Kredit Semester adalah sebuah sistem yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk memilih sendiri kebutuhan belajarnya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang pendidikan menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan (BSNP, 2010:1). Melalui inovasi pendidikan dengan SKS untuk jenjang menengah, bertujuan untuk mengakomodir berbagai perbedaan individual peserta didik, sehingga peserta didik secara individu yang mempunyai kelebihan dalam bidang akademik bisa mempercepat masa studi di sekolahnya.

Usaha pemerintah dalam mengakomodir berbagai perbedaan individual peserta didik tertera dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 Ayat (1), yang menyatakan bahwa :

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak antara lain yaitu: ...
(b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan pasal tersebut khususnya poin “f” menerangkan bahwa setiap peserta didik diberikan kebebasan untuk menyelesaikan beban studinya sesuai kecepatannya masing-masing. Dengan adanya SKS dapat memfasilitasi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata.

Sistem Kredit Semester (SKS) diterapkan dalam semua mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah termasuk juga mata pelajaran PPKn. Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran wajib di Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai mata pelajaran wajib PPKn memiliki muatan materi yang beragam dan kompleks sehingga dalam pembelajarannya memerlukan waktu yang relatif lama. Di dalam Sistem Kredit Semester (SKS) tentunya ada pengaturan beban belajar yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kecepatan peserta didik, begitu juga dalam mata pelajaran PPKn juga harus di atur sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar peserta didik.

SMA Negeri 3 Sidoarjo adalah salah satu sekolah menengah di Sidoarjo yang menerapkan program Sistem Kredit Semester (SKS). Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 14 November 2018 dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bapak Asnan Wahyudi menyebutkan bahwa SMAN 3 Sidoarjo menerapkan SKS sejak Tahun Pelajaran 2013/2014. Penyelenggaraan SKS di SMAN 3 Sidoarjo mengacu pada peraturan Mendikbud No. 158 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Pedoman Teknis yang disusun oleh direktorat PSMA (Pembinaan Sekolah Menengah Atas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di Sidoarjo penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo Nomor 188/410/404.1.3.2/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Satuan Pendidikan penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Sidoarjo.

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “1) Bagaimana implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo yang meliputi : persiapan sekolah, pengaturan kelas, pengelolaan UKBM, pengaturan beban belajar dan pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan SKS. 2) apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di

SMA Negeri 3 Sidoarjo?. 3) Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo?. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: “1) Mendeskripsikan implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo yang meliputi : persiapan sekolah, pengaturan kelas, pengelolaan UKBM, pengaturan beban belajar dan pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan SKS. 2) Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMAN 3 Sidoarjo. 3) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMAN 3 Sidoarjo.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky. Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa merefleksikan pengalaman, kita membangun, mengonstruksi pengetahuan, pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Sedangkan, belajar dalam pandangan konstruktivisme betul-betul menjadi usaha individu dalam mengonstruksi makna tentang sesuatu yang dipelajari. Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal (*Zone of Proximal Development*), menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat yaitu, tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Jarak antara keduanya dikenal dengan *Zone of Proximal Development* (ZPD). Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum matang yang masih berada di dalam proses pematangan. Kemampuan-kemampuan ini akan menjadi matang apabila berinteraksi dengan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten. Dalam teori Vygotsky ini, untuk mencapai *Zone of Proximal Development* (ZPD), terdapat 3 konsep penting yaitu *Scaffolding*, *Actual Development* dan *Potential Development*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Arikunto (2013:3) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara luas dan mendalam mengenai kondisi yang ada, fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian seperti perilaku, motivasi, dan persepsi dengan cara mendeskripsikan yang berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah. Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi Sistem Kredit Semester pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo yang dilakukan dengan menggali data dengan mengamati dan mendengarkan secara seksama penuturan-penuturan informasi dari informan guna memperoleh data tentang implementasi Sistem Kredit Semester pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo.

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 3 Sidoarjo yang beralamat di Jalan Dr Wahidin No. 130 Sidoarjo. Waktu penelitian ini dilakukan dari awal (pengajuan judul) sampai (hasil akhir) sekitar 5 bulan yaitu bulan November sampai dengan bulan April 2019. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang dijadikan subjek atau informan adalah orang yang mengetahui dan memahami terhadap masalah dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai implementasi Sistem Kredit Semester pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Informan yang dianggap mengetahui dan memahami terhadap masalah penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran PPKn serta siswa kelas X. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Eko Redjo Sunariyanto, S.Pd. M.Pd	Kepala sekolah
2.	Asnan Wahyudi, S.Pd.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
3.	1) Drs. Rachmad wahyu Djarmiko 2) Kuroikun Isa, S.Pd.	Guru Mata Pelajaran
4.	Peserta didik	Peserta Didik

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pertama Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara

langsung keadaan dan peristiwa yang terjadi di lapangan agar diperoleh gambaran umum dan luas sesuai masalah yang diteliti. Selain itu, observasi dilakukan guna memperoleh data yang objektif yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan terkait dengan implementasi sistem kredit semester pada mata pelajaran PPKn di SMAN 3 Sidoarjo. Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka data yang dikumpulkan melalui observasi adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan sistem kredit semester.

Kedua, wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam merupakan pertemuan dua orang guna bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono,2018:231). Dalam rangka pengumpulan data maka peneliti melakukan wawancara mendalam secara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi mengenai implementasi sistem kredit semester pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo.

Ketiga, teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk melihat kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pengumpulan data saat penelitian. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk mendapatkan foto-foto hasil kegiatan di tempat penelitian, sehingga memperkuat data yang dihasilkan selama proses pengumpulan data. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan pedoman pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMAN 3 Sidoarjo, RPP mata pelajaran PPKn, Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM), dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi Sistem Kredit Semester di SMAN 3 Sidoarjo.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles and Huberman (dalam Sugiyono,2018:246) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Moleong (2012:326) mengungkapkan bahwa agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan data. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, namun pada penelitian ini akan dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada Mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo

a) Persiapan sekolah dalam penerapan Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan inovasi baru di dalam pendidikan untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih cepat agar bisa lulus dua tahun atau empat semester. SMA Negeri 3 Sidoarjo menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) sejak tahun ajaran 2013/2014 berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/410/404.1.3.2/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Satuan Pendidikan penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Sidoarjo.

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan program baru yang mana dalam penerapannya diperlukan persiapan-persiapan seperti penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Pengembangan perangkat pembelajaran PPKn oleh guru SMA Negeri 3 Sidoarjo dilakukan dengan mengikuti workshop dan MGMP baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo, Bapak Eko Redjo Sunaryanto, S.Pd. M.Pd.

“Program ini masih baru dan bapak/ibu guru belum tahu apa saja yang harus dilakukan maka langkah yang di ambil adalah melakukan workshop. Di dalam workshop ini Bapak/Ibu guru diberikan pemahaman lebih lanjut tentang program SKS, selain itu bapak/ibu guru juga mengikuti pelatihan dalam rangka penyusunan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM). Mengingat UKBM adalah hal baru di dunia pendidikan jadi harus ada treatment khusus dalam penyusunan Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Kalau untuk perangkat pembelajaran lain bapak/ibu guru sudah mahir istilahnya jadi tidak perlu dilatih lagi. Selain workshop bapak/ibu guru juga mengadakan MGMP untuk sharing jika ada kesulitan” (wawancara tanggal 06/02/2019).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Asnan Wahyudi, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Persiapan dalam penyusunan perangkat pembelajaran terutama Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) karena UKBM adalah sesuatu yang baru jadi perlu adanya pelatihan maka sekolah mengadakan workshop pelatihan UKBM untuk melatih bapak/ibu guru dalam menyusun UKBM. Kalau untuk RPP dkk tidak perlu kan mereka sudah bisa. Selain workshop bapak/ibu guru juga ada

MGMP. Kan kalau menyusun UKBM nggak mungkin selesai satu hari jadi nanti setelah workshop kalau masih ada yang bingung bisa di musyawarahkan dalam MGMP” (wawancara tanggal 06/02/2019).

Senada dengan penjelasan di atas Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 Sidoarjo juga mengungkapkan demikian.

“Persiapannya di awal itu pasti ada rapat koordinasi dengan guru-guru yang lain, kemudian ada workshop penyusunan UKBM selanjutnya guru menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi program tahunan, promes, silabus RPP, oh ya kalo di SKS itu ada tambahan UKBM mbak. Setelah perangkat pembelajaran selesai disusun ya kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Kuroikun Isa, S.Pd. selaku guru PPKn kelas XII SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Diawali dengan menyusun perangkat pembelajaran tentunya mulai dari prota, promes, silabus, RPP dan UKBM. Kalau dulu pas awal-awal penerapan SKS kita di latih dulu mbak jadi ada workshop selama 3 hari berturut-turut untuk pelatihan SKS kemudian di setiap awal semester juga ada workshop pelatihan UKBM dan rapat koordinasi dengan Bapak/ibu guru yang lain dalam MGMP” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam persiapan implementasi Sistem Kredit Semester pada mata pelajaran PPKn hal yang pertama kali dilakukan adalah mengikuti workshop. Dengan mengikuti workshop tersebut diharapkan guru mata pelajaran PPKn mengetahui dan memahami Sistem Kredit Semester (SKS) serta bentuk pelajaran yang sesuai dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Selain workshop, dalam persiapan juga membentuk tim MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) tingkat kabupaten dan sekolah dengan tujuan agar guru sesama mata pelajaran dapat memusyawarahkan perancangan kegiatan pembelajaran PPKn yang sesuai dengan ketentuan Sistem Kredit Semester (SKS). Setelah mengikuti workshop dan MGMP guru melakukan penyusunan perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan beban mengajar guru.

b) Pengaturan Kelas dalam Sistem Kredit Semester (SKS)

Penataan kelas di dalam Sistem Kredit Semester (SKS) disebut dengan istilah “kelas heterogen” yang artinya di dalam satu kelas terdapat bermacam-macam peserta didik dengan bakat, minat dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta

guru PPKn SMA Negeri 3 Sidoarjo.

Bapak Eko Redjo Sunariyanto, S.Pd. M.Pd. selaku kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo menjelaskan sebagai berikut.

“Sebenarnya kalau pengaturan kelas dalam SKS itu tergantung bagaimana sekolah menangkap isi dari permendikbud, jadi tidak ada ketentuan khusus di dalam permendikbud yang mengatur tentang pengaturan kelas harus bagaimana. Kalau di SMA Negeri 3 Sidoarjo sendiri pengaturan kelasnya dibuat kelas heterogen, artinya di dalam satu kelas itu ada bermacam-macam siswa dengan bakat, minat dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Jadi antara PDCB (Peserta Didik Cepat Belajar) dengan reguler dijadikan satu kelas mbak. Tujuannya agar tidak ada diskriminasi sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk bisa lulus cepat. Kalau PDCB dijadikan satu kelas sendiri nanti kan kasihan yang reguler ketika di pertengahan dia ingin masuk PDCB kan jadi nggak bisa” (wawancara tanggal 06/02/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asnan Wahyudi, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Pengaturan kelas di dalam SKS yaitu kita menggunakan kelas tetap seperti sekolah non SKS, jadi antara siswa PDCB dengan siswa reguler itu jadi satu tidak ada kelas khusus, tetapi nanti ketika siswa PDCB memasuki kelas XI otomatis kan mereka sudah masuk ke dalam materi kelas XII jadi nanti siswa PDCB itu akan di tarik dari kelas XI untuk di sebar ke kelas XII, sehingga terjadi moving class” (wawancara tanggal 06/02/2019).

Senada dengan pendapat di atas Bapak Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 Sidoarjo mengungkapkan

“Kalau di SKS kelasnya sama seperti non SKS, tidak ada kelas khusus. Anak-anak PDCB dengan reguler tetap jadi satu kelas. Namun itu hanya berlaku di kelas X dan XI semester 3, ketika PDCB sudah memasuki semester 4 mereka akan di pindah ke kelas XII” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Pendapat di atas dikuatkan oleh Ibu Kuroikun Isa, S.Pd. selaku guru PPKn kelas XII SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Karena di dalam SKS kelas bersifat heterogen maka untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi ya anak-anak kita kelompokkan berdasarkan pencapaian UKBM. Misalnya anak-anak yang tergolong PDCB dijadikan satu kelompok

begitu juga anak-anak yang reguler” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan kelas di dalam Sistem Kredit Semester (SKS) yang ada di SMA Negeri 3 Sidoarjo bersifat kelas heterogen, artinya tidak ada kelas khusus untuk Peserta Didik Cepat Belajar (PDCB). Semua kelas sama tidak ada ruang pembatas antara PDCB dengan peserta didik reguler. Tujuan dari penerapan kelas heterogen ini dimaksudkan agar tidak ada diskriminasi antara PDCB dengan peserta didik reguler. Diskriminasi yang dimaksud yaitu apabila PDCB dijadikan dalam satu kelas khusus, maka peserta didik reguler tidak memiliki kesempatan untuk bisa masuk kelas PDCB di tengah-tengah semester, sedangkan motivasi belajar peserta didik tidak selamanya berada di awal semester, kadang-kadang ada pula peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi ketika di tengah semester, oleh karena itu dengan adanya kelas heterogen diharapkan peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk bisa lulus lebih cepat.

c) **Pengelolaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM)**

Sistem Kredit Semester merupakan suatu sistem baru yang menggunakan perangkat pembelajaran yang baru juga, salah satu perangkat pembelajaran yang berbeda dengan dengan sistem paket yaitu Unit Kegiatan Belajar Mandiri atau biasa di singkat dengan UKBM. UKBM merupakan hal baru di dalam pendidikan sehingga dalam penyusunannya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu. Oleh karena itu sekolah mengadakan workshop untuk memberikan pelatihan kepada Bapak/Ibu guru dalam menyusun UKBM. UKBM ini merupakan penjabaran ulang dari RPP yang telah disusun oleh Bapak/Ibu guru yang di dalamnya berisikan pokok-pokok materi dan lembar kerja peserta didik.

Proses penyusunan UKBM diawali dengan penyusunan perangkat pembelajaran seperti prota, promes, silabus dan RPP. Pada dasarnya UKBM merupakan penjabaran ulang dari RPP yang telah disusun oleh Bapak/Ibu guru yang di dalamnya berisikan pokok-pokok materi dan lembar kerja peserta didik, sehingga penyusunannya harus diawali dengan penyusunan RPP. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo, Bapak Eko Redjo Sunaryanto, S.Pd. M.Pd. sebagai berikut.

“Kemudian setelah RPP selesai disusun rencana-rencana yang tercantum di dalam RPP dijabarkan lagi ke dalam UKBM, antara RPP dan UKBM harus sinkron. Jadi ibaratnya gini kalau RPP itu berisi rencana-rencana maka UKBM itu adalah tindakan riilnya” (wawancara tanggal 06/02/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asnan Wahyudi, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Sebenarnya UKBM itu adalah terjemahan terperinci dari RPP, jadi apa yang ada di RPP nanti akan dijabarkan di dalam UKBM. Sehingga RPP dan UKBM sudah pasti sinkron. Ibaratnya gini RPP itu adalah rencananya dan UKBM itu adalah tindakan realnya. Skenario-skenario yang ada di dalam UKBM akan dijabarkan di dalam UKBM” (wawancara tanggal 06/02/2019).

Senada dengan pendapat di atas Bapak Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 Sidoarjo mengungkapkan:

“UKBM itu kan hanya sekedar ikhtisar yang dilengkapi dengan lembar kerja, jadi kita membuat rangkuman materi kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan untuk lembar kerjanya itu. Jadi semua materi yang menjadi beban belajar siswa harus termuat di dalam UKBM. Tetapi materinya ini tidak terperinci seperti di dalam buku paket mbak, kalau di UKBM itu hanya garis besarnya saja oh ini lo yang menjadi acuan kita di dalam bab ini. Jadi siswa tetap harus memiliki sumber lain karena UKBM hanya sekedar panduan saja” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibu Kuroikun Isa, S.Pd. selaku guru PPKn kelas XII SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Pertama-tama kita lihat dulu muatan materi pokoknya di dalam UKBM, nah dari materi pokok itu kita jabarkan namun hanya dalam bentuk rangkuman saja bukan rincian materi secara lengkap. Kalau rincian materi lengkap itu ya tetap ada di buku paket sedangkan UKBM kan berisi garis besar materi ditambah dengan lembar kerja siswa. Cakupan materi PPKn itu kan banyak ya mbak jadi nggak mungkin kalau di muat semua di UKBM jadi hanya sebatas materi inti nah nanti anak-anak bisa mencari detailnya di buku paket atau di internet” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa UKBM merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sehingga dalam penyusunannya harus berpedoman pada RPP yang telah disusun oleh bapak/ibu guru. Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan UKBM yaitu guru harus terlebih dahulu menyusun Prota, Promes, silabus dan RPP. RPP yang sudah disusun selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci ke dalam UKBM. Mengingat materi PPKn yang kompleks, maka sebelum menyusun UKBM Bapak/Ibu guru terlebih dahulu membuat rangkuman tentang garis besar materi

yang akan disampaikan. Tidak mungkin seluruh materi dimasukan ke dalam UKBM, karena UKBM hanya berisi pokok-pokok materi saja sedangkan rincian materi secara detail tetap ada di dalam buku paket. Setelah merangkum materi selanjutnya adalah memasukan materi ke dalam UKBM serta menyusun lembar kegiatan peserta didik.

Pengelolaan UKBM di SMA Negeri 3 Sidoarjo dilakukan berbasis pada layanan individual. Layanan individual merupakan salah satu program dalam Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Pada dasarnya layanan individual ini tidak termaktub di dalam permendikbud, tetapi sekolah memiliki wewenang untuk menerjemahkan isi permendikbud, jadi tidak semua sekolah yang menerapkan SKS juga menerapkan layanan individual. Dengan adanya layanan individual, peserta didik akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Layanan individual telah diterapkan di SMA Negeri 3 Sidoarjo sejak tahun ajaran 2017/2018. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Eko Redjo Sunaryanto, S.Pd. M.Pd. selaku kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Oh ya... layanan individual ini hanya ada di sekolah yang menerapkan SKS. Jadi sebenarnya layanan individual ini dimaksudkan untuk memfasilitasi PDCB (peserta didik cepat belajar) yaitu peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas siswa reguler. Nanti kan di dalam SKS ada UKBM nah siswa mengerjakan UKBM ini secara mandiri sesuai dengan minat dan kemampuannya, tidak harus bergantung pada instruksi guru. Jika siswa ingin menyelesaikan studi lebih cepat yaitu 2 tahun ya siswa harus lebih giat mengerjakan UKBM. Di dalam UKBM ada bebrapa unit pembelajaran tergantung pada KD dan materinya. Ketika siswa sudah menyelesaikan UKBM unit 1 sedangkan teman-teman yang lainnya belum maka secara mandiri siswa harus menghubungi gurunya untuk melakukan layanan individual yaitu meminta tes formatif, apabila di dalam tes formatif siswa dinyatakan tuntas maka siswa diperbolehkan melanjutkan UKBM unit dua begitu seterusnya. Jadi jika siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan UKBM, mereka harus berinisiatif untuk menemui gurunya dan meminta bantuan. Inilah yang disebut dengan layanan individual” (wawancara tanggal 06/02/2019).

Sedangkan di dalam mata pelajaran PPKn pelaksanaan layanan individual adalah sebagai berikut sesuai penuturan guru PPKn SMA Negeri 3 Sidoarjo, Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 Sidoarjo mengungkapkan:

“Kalau di dalam kelas saya biasanya menggunakan pengelompokan. Jadi siswa yang PDCB di kelompokkan jadi satu baris di pisah dengan siswa reguler, hal ini untuk memudahkan saya dalam memberikan penjelasan materi, selain itu juga memudahkan jika mereka ingin berdiskusi terkait UKBM yang dipelajari. Kalo misalnya ada kesulitan saya juga jadi mudah mbak dalam memberikan penjelasan. Kalau di luar kelas biasanya siswa PDCB kalau sudah menyelesaikan unit UKBM menemui saya di kantor untuk meminta tes formatif, atau mungkin ketika mereka ada waktu luang dan ingin menemui saya ya juga saya layani apa masalahnya, apa keluhannya. Jadi di sisi guru berperan ganda ya sebagai pendidik sekaligus memberikan konseling atau pemecahan masalah ketika siswa ada masalah”. (wawancara tanggal 19/02/2019).

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibu Kuroikun Isa, S.Pd. selaku guru PPKn kelas XII SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Pelayanannya ya dengan cara pendekatan kalau saya. Pendekatan itu maksudnya begini misalnya di dalam kelas ada PDCB sejumlah 5 anak ya 5 anak itu di kelompokkan tempat duduknya kemudian saya suruh diskusi UKBM nanti kalau ada kesulitan mereka bisa tanya ke saya. Kemudian untuk siswa reguler juga demikian tetapi kalau reguler biasanya saya tetap memberikan penjelasan di depan kelas karena mereka jumlahnya banyak jadi tidak mungkin saya layani satu per satu. Beda lagi kalau ada siswa misalnya sering tidak masuk kemudian ketinggalan UKBM itu nanti akan saya layani ya sampai dia bisa menyusul teman-temannya yang reguler. Jadi intinya teknisnya itu dengan pendekatan individual mbak kalau mereka ada kesulitan kita bantu, kalau mereka minta penjelasan ya kita jelaskan” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Layanan individual dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta didik terutama PDCB agar mereka bisa menyelesaikan beban belajar dalam waktu 4 semester atau 2 tahun. Layanan individual menuntun peserta didik untuk aktif baik di dalam jam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dengan adanya layanan individual, guru harus melayani setiap peserta didik yang mengalami kesulitan. Layanan individual diberikan bisa pada saat jam pelajaran atau diluar jam pelajaran ketika guru tidak sibuk siswa boleh untuk meminta bantuan guru dalam menyelesaikan masalah.

Dalam mata pelajaran PPKn guru memberikan layanan individual dengan cara mengelompokkan peserta didik PDCB menjadi satu kelompok. Hal ini

dimaksudkan agar guru lebih mudah dalam memberikan penjelasan kepada PDCB karena jumlah PDCB dalam satu kelas rata-rata hanya 5 anak, sedangkan sisanya peserta didik reguler. Ketika peserta didik reguler membahas materi yang lain, PDCB diberi tugas untuk mengerjakan UKBM dan jika ada kesulitan atau ada materi yang belum dipahami PDCB akan meminta bantuan dari guru untuk dijelaskan. Inilah yang dimaksud dengan layanan individual di dalam mata pelajaran PPKn.

d) Pengaturan Beban Belajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 3 Sidoarjo

Pengaturan beban belajar dalam penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 3 Sidoarjo berbeda dengan pengaturan beban belajar dalam penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) di perguruan tinggi. Jika di perguruan tinggi pengambilan beban belajar disesuaikan dengan IPK yang diperoleh, yaitu apabila IPK nya tinggi maka mahasiswa bisa mengambil beban belajar lebih banyak. Sedangkan di SMA Negeri 3 Sidoarjo tidak demikian karena penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) bersifat paket, artinya setiap semester beban belajar yang diambil seluruh siswa jumlahnya sama yaitu terdiri dari mata pelajaran wajib, peminatan dan lintas minat. Hanya saja penerapan SKS di SMA Negeri 3 Sidoarjo berbasis UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) sehingga cepat atau tidaknya peserta didik dapat dilihat dari pencapaian UKBM. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan terkait dengan pengaturan beban belajar :

Bapak Eko Redjo Sunaryanto, S.Pd. M.Pd. selaku kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo menjelaskan sebagai berikut.

“Kalau untuk pengambilan beban belajar itu sifatnya otomatis mbak. Jadi setiap semester mata pelajaran yang di ambil sama tidak ada perubahan, karena ini kan di sekolah bukan perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi kan tergantung pada IPK, nah kalau di SMA uniknya ini beban belajarnya tetap sepanjang semester. Cuma kan kita berbasis UKBM jadi capaian UKBM ini yang nantinya menjadi pembeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Ada yang sudah samapi UKBM 2 ada juga UKBM 5 dan ada juga yang masih di UKBM 1. Macam-macam lah pokoknya tergantung kecepatan anaknya” (wawancara tanggal 06/02/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asnan Wahyudi, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Pengambilan belajar di SMA Negeri 3 Sidoarjo sejak tahun ajaran 2017/2018 sampai sekarang bersifat otomatis, karena

sistemnya SKS paket jadi setiap semester mata pelajaran yang diambil anak-anak ya itu-itu saja. Kalau dulu di awal-awal penerapan SKS di sini memang menggunakan sistem on/off atau sistem kontinu diskontinu, jadi anak-anak dapat emngambil beban belajar lebih banyak jika IPK nya tinggi, namun sistem tersebut dirasa kurang efektif karena tidak semua mata pelajaran muncul di setiap semester, nah misalnya PPKn muncul di semester 1 dan 3 saja sedangkan di semester 2 dan 4 tidak muncul. Pada semester 2 dan 4 ini nanti guru dianggap tidak mengajar karena mata pelajarannya tidak muncul, sehingga ada perubahan dari mendikbud untuk mengubah sistem on/off menjadi sistem paket agar lebih efektif” (wawancara tanggal 06/02/2019)

Sedangkan dalam pembelajaran PPKn pengaturan beban belajar yang terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan penugasan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur yaitu sebagai berikut :

Bapak Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 Sidoarjo mengungkapkan:

“Pengaturannya ya pakek prosentase, seumpama katakanlah 2 jam pelajaran kan ada 90 menit, ya tinggal di bagi kira-kira 54 menit untuk kegiatan penugasan terstruktur dan mandiri tidak terstruktur dan sisanya untuk kegiatan tatap muka” (wawancara tanggal 19/02/2019)

Senada dengan pendapat di atas Ibu Kuroikun Isa, S.Pd. selaku guru PPKn kelas XII SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Pengaturannya sama seperti yang tercantum di dalam pedoman yaitu kalau kegiatan tatap muka katakanlah 40% maka tugas terstruktur 30% dan kegiatan mandiri 30%”(wawancara tanggal 19/02/2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 3 Sidoarjo telah mengalami dua kali perubahan, yaitu pada awal-awal penerapan tepatnya tahun ajaran 2013/2014 menggunakan sistem on/off atau sistem koninu diskontinu. Sistem in/off ini memungkinkan peserta didik mengambil beban belajar sesuai dengan IPK yang diperoleh, jika IPK tinggi maka peserta didik boleh mengambil beban belajar yang lebih banyak. Dalam sistem on/off mata pelajaran tidak akan muncul di semua semester. Adakalanya hanya muncul di semester ganjil saja atau sebaliknya.

Seiring berjalannya waktu sistem ini dirasa kurang efektif karena jam mengajar guru menjadi tidak beraturan. Ketika mata pelajaran tidak muncul di semester tertentu maka sistem akan menganggap bahwa guru yang bersangkutan tidak mengajar, sehingga jam

mengajarnya tidak memenuhi aturan yang ada. Karena dirasa kurang efektif maka pada tahun ajaran 2017/2018 diganti menjadi SKS dengan sistem paket. Dalam sistem paket setiap semester beban belajar semua peserta didik sama, yaitu terdiri dari mata pelajaran wajib, peminatan dan lintas minat.

Pengaturan kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri dalam mata pelajaran PPKn sesuai dengan pedoman pelaksanaan Sistem Kredit semester (SKS) yaitu 40% untuk kegiatan tatap muka dan 60% untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Sedangkan kegiatan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaiannya diatur oleh peserta didik atas dasar kesepakatan dengan pendidik.

e) Pelaksanaan Pembelajaran PPKn dengan Sistem Kredit Semester (SKS)

Kegiatan pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, maupun peserta didik dengan lingkungan. Proses ini diharapkan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik.

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan suatu sistem yang memusatkan kegiatan pembelajaran pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dengan diterapkannya metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tugas seorang guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu sebagai fasilitator yang bertugas membantu peserta didik apabila menemui kesulitan di dalam proses pembelajaran sebagai wujud dari program Sistem Kredit Semester (SKS) yaitu layanan individual. Selain sebagai fasilitator, guru juga berperan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menantang dan inovatif bagi peserta didik melalui penerapan model dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan pembelajaran PPKn dilakukan dengan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 3 Sidoarjo, yaitu kurikulum 2013. Dalam penerapannya guru berpedoman pada rencana pembelajaran yang sudah disusun yakni mengintegrasikan penerapan KI-1 sampai KI-4 dalam

satu materi ajar, yang mana dalam kegiatan pembelajaran tentunya yang utama adalah KI-3 yaitu pengetahuan. Berikut hasil wawancara dengan guru PPKn SMA Negeri 3 Sidoarjo.

Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 Sidoarjo mengungkapkan:

“Untuk KI-1 dan KI-2 itu tidak langsung ya, artinya tidak kita sampaikan di RPP yang detail dan pembelajaran tidak langsung. KI-3 dan KI-4 pembelajaran langsung di kelas” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Kuroikun Isa, S.Pd. selaku guru PPKn kelas XII SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“KI-1 dan KI-2 itu istilahnya sudah menyatu dengan KI-3 dan KI-4. Jadi pembelajaran dalam KI-1 dan KI-2 tidak khusus, tetapi menyatu dengan KI-3 dan KI-4, tetapi penerapan KI-3 dan KI-4 itu utama yang ada dalam KBM. Mengajak anak berdoa itu kan sudah umum ya terus mengajar materi dengan religius dan sosial. Ya intinya untuk penerapan KI-1 sampai KI-4 sesuai dengan yang ada di pedoman kurikulum 2013 mbak” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn dilakukan dengan mengintegrasikan KD-KD yang terdapat dalam KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 dalam satu pertemuan dengan mengutamakan penerapan KD-KD yang ada dalam KI-3, tetapi KI-1, KI-2, dan KI-4 juga diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn, sehingga dalam satu pertemuan pembelajaran tidak khusus untuk KI-1 dan KI-2 atau sebaliknya KI-3 dan KI-4 tetapi semua KD dari KI-1 sampai KI-4 direalisasikan dalam satu pertemuan.

Sesuai kurikulum 2013 implementasi pembelajaran PPKn dari KI-1 sampai KI-4 diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Berdasarkan hasil observasi, SMA Negeri 3 Sidoarjo dalam pembelajaran PPKn sudah menerapkan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kegiatan Pendahuluan

Berdasarkan hasil observasi bahwa dalam kegiatan pendahuluan diawali dengan kegiatan mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan menyapa peserta didik. Melakukan doa bersama sesuai kepercayaan masing-masing serta mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian sebelum kegiatan pembelajaran dimulai peserta didik diminta untuk menyanyikan satu lagu wajib Nasional untuk membangkitkan semangat

belajar peserta didik.

Hasil observasi di atas kurang sesuai dengan hasil analisis dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru PPKn SMA Negeri 3 Sidoarjo, di mana dalam RPP disebutkan bahwa kegiatan pendahuluan diawali dengan kegiatan melakukan doa bersama sesuai kepercayaan masing-masing serta mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan apersepsi yaitu mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Setelah itu guru memberikan motivasi dan memberikan acuan mengenai materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa belum terjadi kesesuaian antara hasil observasi dengan RPP. Pada hasil observasi kegiatan apersepsi, motivasi dan pemberian acuan kegiatan pembelajaran belum muncul, setelah peneliti melakukan konfirmasi kepada Bapak Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 beliau mengungkapkan bahwa :

“Iya memang belum dimunculkan mbak kegiatan apersepsi, motivasi dan pemberian acuan yang ada di dalam RPP karena apa ya anak-anak itu susah kalau disuruh bertanya jadi ya kegiatan pendahuluan itu hanya sebatas berdoa, absen kemudian langsung pada kegiatan inti” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan apersepsi, motivasi dan pemberian acuan belum muncul di dalam kegiatan pembelajaran karena peserta didik kurang aktif sehingga kegiatan apersepsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kegiatan Inti

Kegiatan inti ini sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu berpusat pada peserta didik. Kegiatan inti merupakan kegiatan penyampaian materi oleh guru kepada peserta didik melalui penggunaan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam proses pembelajaran juga dilakukan dengan menggunakan kegiatan 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan yang merupakan kegiatan pembelajaran utama dalam kurikulum 2013. Proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo menggunakan metode dan model pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru PPKn SMA Negeri 3 Sidoarjo berkaitan dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 Sidoarjo mengungkapkan bahwa :

“Kalau untuk metode saya kira sama dengan sekolah non SKS, yang membedakan hanya layanannya saja. Hanya saja kalau PPKn kan tidak cukup dengan UKBM saja harus disertai dengan penjelasan dan pemberian contoh konkrit. Dalam hal ini saya biasanya menggunakan metode presentasi, debat, problem solving dll. Sebenarnya kalau hanya UKBM saja tanpa penjelasan bisa-bisa saja kalau guru tidak kasihian kepada siswa tetapi kan kasihian juga mereka harus belajar sendiri tanpa dijelaskan lebih lanjut, jadi saya tetap menjelaskan di akhir-akhir pembelajaran. Apalagi kalau PPKn penilaian sikap, kognitif dan keterampilan menjadi satu, sehingga perlu adanya kegiatan di dalam kelas untuk melakukan penilaian sikap dan keterampilan” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Pendapat di atas dikuatkan oleh Ibu Kuroikun Isa, S.Pd. selaku guru PPKn kelas XII SMA Negeri 3 Sidoarjo sebagai berikut.

“Untuk metode pembelajaran saya lebih sering menggunakan power point, kadang juga saya sisipi video apabila materinya memerlukan tayangan video sekalian untuk menarik minat belajar anak-anak. Kan anak-anak biasanya senang kalau ada yang bisa di tonton. Disamping itu saya tetap menggunakan ceramah karena apa, tidak bisa dipungkiri bahwa PPKn itu materinya memerlukan penjelasan konseptual jadi anak-anak itu biasanya malas membaca jadi kalau saya pasif ya mereka tidak akan paham dengan materinya. Sebenarnya anaknya SKS itu gini mbak kalau gurunya malas ya bisa saja anak-anak hanya disuruh mengerjakan UKBM dan gurunya santai-santai tapi kalau saya ndak bisa seperti itu. Harus saya jelaskan terutama saya berikan contoh konkrit kejadian yang ada di sekitar mereka agar mereka paham bukan hanya paham pada materinya tetapi juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari” (wawancara tanggal 19/02/2019).

Berdasarkan wawancara di atas metode dan model pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran PPKn adalah ceramah, diskusi, gambar dan video yang mana metode dan model tersebut dipadukan dengan model pembelajaran lain yang bervariasi. Penerapan metode dan model pembelajaran tersebut juga dipadukan dengan pendekatan saintifik (5M) yang merupakan kegiatan utama dalam kurikulum 2013. Dengan menerapkan metode dan model pembelajaran tersebut guru diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik.

Sesuai hasil observasi, untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum 2013,

yang membedakan hanya layanannya saja, yaitu jika di dalam Sistem Kredit Semester (SKS) guru tidak lagi berperan aktif dalam menjelaskan materi di depan kelas, mengingat di dalam kelas capaian UKBM peserta didik berbeda-beda. Namun pada suatu waktu apabila materi yang hendak disampaikan sama maka guru tetap menjelaskan materi di depan kelas secara klasikal.

Pada kegiatan inti guru menggunakan metode diskusi yang mana hampir seluruh peserta didik mengikuti proses diskusi dengan baik dan seksama, saling bertukar pendapat dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas. Selain itu ketika diskusi peserta didik mempunyai rasa semangat yang tinggi hal ini terlihat ketika sesi tanya jawab antara kelompok penyaji dengan kelompok audience saling beradu argumen yang sama-sama kuat sehingga memakan waktu yang lama, bahkan jika guru tidak menengahi bisa jadi 2 jam pelajaran tidak cukup untuk presentasi satu kelompok.

Ketika peserta didik reguler melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, maka peserta didik cepat belajar (PDCB) juga sama melakukan kegiatan diskusi dengan teman kelompoknya yang juga sama-sama PDCB, namun diskusi PDCB tidak dipresentasikan seperti peserta didik reguler. PDCB mendiskusikan UKBM kemudian jika ada kesulitan mereka meminta guru untuk menjelaskan. Disinilah layanan individual itu digunakan, yaitu ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi mereka akan meminta guru untuk menjelaskan dan guru harus memberikan layanan individual secara adil antara peserta didik reguler dengan PDCB.

Proses kegiatan pembelajaran PPKn dengan Sistem Kredit Semester (SKS) tetap mengacu pada kurikulum 2013. Sehingga dalam pelaksanaannya juga tetap menggunakan kegiatan 5M. Kegiatan 5M merupakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kegiatan 5M juga diharapkan memberikan rasa semangat dan motivasi peserta didik selama proses pembelajaran. Tetapi kegiatan 5M dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, hal ini di karenakan guru mengalami kesulitan untuk menerapkan pendekatan saintifik disebabkan kondisi kelas yang heterogen, sehingga harus dipadukan dengan model pembelajaran yang lain. Hal ini sesuai dengan penuturan Drs. Rachmad Wahyu Djatmiko selaku guru PPKn kelas X SMA Negeri 3 Sidoarjo mengungkapkan bahwa :

“Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran ya tetap mengacu kurikulum 2013 mbak. Ada kegiatan 5M itu. Untuk penerapan saintifik memang dalam pembelajaran semua

diharapkan menerapkannya. Dimana dalam pendekatan saintifik ini ada proses yang namanya mengamati, menyanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Lha disini memang dalam pembelajaran seharusnya logikanya yang bagus harus diterapkan saintifik tersebut tetapi kalau melihat kondisi kelas yang heterogen kan jadi susah dalam menerapkan. Terutama bagi yang PDCB itu kan nggak mungkin bisa diterapkan 5M karena sifatnya mereka belajar mandiri, jadi ya kadang diterapkan tapi tidak maksimal karena hanya pada anak yang reguler saja".(wawancara tanggal 19/02/2019).

Senada dengan pendapat di atas Ibu Kurokun Isa, S.Pd. selaku guru PPKn kelas XII SMA Negeri 3 Sidoarjo mengungkapkan sebagai berikut.

"Pembelajarannya ya tetap sama dengan sekolah-sekolah biasa mbak. Kan kurikulumnya juga sama yaitu K13. Kalau di dalam K13 kan ada kegiatan 5M, kita juga ada di dalam RPP. Tetapi memang dalam penerapannya di dalam SKS tidak mudah, karena kelasnya kan heterogen ya jadi kegiatannya tidak bisa di samaratakan karena prinsipnya SKS kan belajar sesuai bakat, minat dan kecepatan jadi ya memang tidak bisa disamakan".(wawancara tanggal 19/02/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik 5M dalam Sistem Kredit Semester (SKS) sulit. Hal ini dikarenakan pengaturan kelas dalam SKS yang heterogen sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tidak bisa satu metode digunakan untuk satu kelas secara keseluruhan, mengingat dalam satu kelas terdapat PDCB dan peserta didik reguler. Oleh karena itu penerapan pendekatan saintifik dalam SKS dipadukan ke dalam model pembelajaran kooperatif seperti problem based learning dsb.

Sesuai hasil observasi untuk pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sudah diterapkan dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya diterapkan karena kendala kondisi kelas yang heterogen. Sehingga penerapan pendekatan saintifik hanya terbatas pada peserta didik reguler, sedangkan untuk PDCB menggunakan pendekatan layanan individual sesuai dengan program SKS di SMA Negeri 3 Sidoarjo.

Kegiatan penutup

Berdasarkan hasil observasi bahwa dalam kegiatan penutup guru memberikan refleksi dengan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, memberikan penguatan hasil diskusi peserta didik, dan diakhiri dengan pembacaan doa sesuai kepercayaan masing-masing.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) Pada Mata Pelajaran PPKn Di SMAN 3 Sidoarjo

Dalam pelaksanaan suatu sistem baru tentunya tidak mungkin berjalan mulus tanpa adanya hambatan, begitu juga dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Mengingat Sistem Kredit Semester merupakan sesuatu yang baru di dalam dunia pendidikan tingkat sekolah menengah sehingga pelaksanaannya pun tidak luput dari adanya hambatan. bebrapa hambatan yang dialami oleh SMA Negeri 3 Sidoarjo dalam implementasi Sistem Kredit Semester pada mata pelajaran PPKn yaitu yang pertama guru kesulitan dalam membagi waktu karena beban belajar peserta didik di dalam SKS tentunya lebih berat, kesulitan dalam mengelola kelas karena kelas bersifat heterogen, dimana di dalam kelas peserta didik mempelajari materi yang berbeda-beda, peserta didik belum terlalu memahami tentang apa itu Sistem Kredit Semester dan yang terakhir peserta didik cenderung kurang memiliki motivasi untuk menyelesaikan beban belajar lebih cepat.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo

Untuk mengatasi hambatan yang ada guru menggunakan cara yang hampir sama yaitu. Yang pertama untuk mengatasi hambatan waktu karena sering ada kegiatan rapat yaitu dengan memberikan tugas untuk mengerjakan UKBM yang selanjutnya akan di bahas pada pertemuan berikutnya, tetapi jika memang ada waktu dan materi mengharuskan guru untuk menjelaskan maka akan dicarikan jam tambahan untuk mengganti jam yang kosong. Ke dua untuk mengatasi hambatan pengelolaan kelas heterogen yaitu dengan cara mengelompokkan posisi duduk antara peserta didik reguler dengan PDCB di pisah, hal ini untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Ke tiga untuk mengatasi kurangnya motivasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan beban belajar lebih cepat berbeda antara pak Miko dan Bu Isa. Pak miko menggunakan pendekatan memberikan motivasi di sela-sela jam pelajaran, sedangkan Bu Isa lebih memilih menggunakan pendekatan layanan individual sehingga Bu Isa mendekati peserta didik yang dinilai memiliki potensi untuk cepat belajar untuk diberi arahan agar peserta didik memiliki motivasi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya.

Pembahasan

Berdasarkan teori belajar konstruktivisme dari

Vygotsky, untuk mencapai *Zone of Proximal Development (ZPD)*, terdapat 3 konsep penting yaitu *Scaffolding*, *Actual Development* dan *Potential Development*. 3 konsep penting tersebut berkaitan dengan implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo, antara lain :

a. Pembelajaran Klasikal

Pembelajaran klasikal merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam memberikan bantuan kepada peserta didik pada tahap-tahap awal pembelajaran sampai peserta didik mampu mengambil alih tanggung jawab setelah peserta didik bisa melakukannya sendiri. Kegiatan ini dilakukan pada awal-awal pembelajaran yaitu ketika peserta didik di dalam satu kelas masih mempelajari materi yang sama sehingga guru memberikan bantuan kepada peserta didik dengan cara menjelaskan materi secara klasikal di depan kelas.

Jika ditinjau dengan teori belajar konstruktivisme yang di kemukakan oleh Vygotsky yaitu *Scaffolding*, maka kegiatan penjelasan klasikal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan guru untuk memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya, yang mana dalam tahap ini guru memberikan penjelasan secara menyeluruh dengan harapan agar peserta didik memiliki pengetahuan awal tentang materi yang disampaikan. Karena di awal-awal peserta didik di dalam satu kelas masih mempelajari materi yang sama sehingga memungkinkan guru untuk menjelaskan materi dengan metode ceramah.

a. Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM)

Kegiatan lain yang dilakukan guru untuk membantu perkembangan peserta didik adalah Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM). Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) merupakan salah satu perangkat pembelajaran di dalam Sistem Kredit Semester (SKS) yang melatih peserta didik untuk belajar secara mandiri. Dengan adanya UKBM peserta didik bisa belajar secara mandiri tanpa menunggu instruksi dari guru. UKBM ini yang nantinya menjadi acuan guru dalam melihat pencapaian peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki capaian UKBM yang berbeda-beda tergantung pada kecepatan belajarnya.

Jika ditinjau dari teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky yaitu *Actual Development*, maka UKBM ini merupakan aktivitas peserta didik yang dapat dilakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di mana dengan kegiatan UKBM ini peserta didik dapat mengembangkannya sendiri pengetahuannya tanpa bantuan orang lain, sehingga akan membantu dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah atau memecahkan masalah secara mandiri.

b. Layanan Individual

Kemudian kegiatan yang terakhir yang dilakukan oleh guru untuk membantu perkembangan peserta didik yakni program layanan individual. Program ini merupakan program bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Layanan individual ini sifatnya individu artinya setiap peserta didik harus aktif meminta bantuan kepada guru apabila menemui kesulitan. Namun sebelum meminta bantuan terlebih dahulu peserta didik berusaha sendiri mencari bantuan dari pihak lain seperti berdiskusi dengan temannya, mencari bantuan dari berbagai sumber misalnya internet, buku dan sumber referensi lain. Kemudian jika tetap tidak menemukan penyelesaian peserta didik bisa menggunakan layanan individual sebagai alternatif untuk memecahkan masalah, yaitu dengan meminta bantuan kepada guru.

Jika ditinjau dari teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky yaitu *Potential Development*, maka kegiatan ini dapat membantu perkembangan peserta didik. Dimana peserta didik dilatih untuk aktif meminta bantuan kepada guru apabila menemui kesulitan. Dengan adanya kegiatan tersebut tentunya peserta didik dapat menyelesaikan berbagai masalah dibawah petunjuk orang dewasa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Sistem Kredit Semester pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Kredit Semester pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan guru dalam merancang perangkat pembelajaran di SMA Negeri 3 Sidoarjo diawali dengan kegiatan workshop dan mengadakan MGMP baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten. Kegiatan tersebut dilakukan guna memusyawarahkan perangkat pembelajaran yang mendukung Sistem Kredit Semester serta melakukan evaluasi dari pelaksanaan pada pembelajaran sebelumnya.
 - b. Pengaturan kelas dalam Sistem Kredit Semester (SKS) disebut dengan istilah “kelas heterogen” yang artinya di dalam satu kelas terdapat bermacam-macam peserta didik dengan bakat, minat dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dalam satu kelas terdiri dari peserta didik Reguler dan peserta didik cerdas berbakat (PDCB), hal ini dimaksudkan agar tidak ada diskriminasi antara PDCB dengan peserta didik reguler.

- c. Pengelolaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) dilakukan oleh guru dengan berpedoman pada RPP. Penyusunan UKBM harus sesuai dengan isi RPP karena UKBM merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPP. Pengelolaan UKBM di SMA Negeri 3 Sidoarjo dilakukan berbasis pada layanan individual, artinya peserta didik akan mendapatkan pelayanan dari guru sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Pengaturan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 3 Sidoarjo telah mengalami dua kali perubahan yaitu pada awal penerapan SKS, SMA Negeri 3 Sidoarjo tepatnya pada tahun ajaran 2013/2014 menggunakan sistem kontinu/diskontinu, artinya pengambilan beban belajar disesuaikan dengan Indeks Prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya, namun sistem ini dirasa kurang efektif karena jam mengajar guru kurang teratur, sehingga sejak tahun ajaran 2017/2018 diganti menjadi sistem paket berbasis layanan individual yang artinya semua peserta didik mengambil beban belajar yang sama setiap semester dengan jumlah mata pelajaran yang sama yaitu terdiri dari mata pelajaran wajib, peminatan dan lintas minat.
- e. Pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan Sistem Kredit Semester (SKS)
 - 1) Kegiatan pendahuluan, dalam kegiatan pendahuluan diawali dengan kegiatan mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan menyapa peserta didik. Melakukan doa bersama sesuai kepercayaan masing-masing serta mengecek kehadiran peserta didik.
 - 2) Kegiatan Inti, untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu tetap menggunakan pendekatan saintifik 5M, yang membedakan hanya layanannya saja, yaitu jika di dalam Sistem Kredit Semester (SKS) guru tidak lagi berperan aktif dalam menjelaskan materi di depan kelas, mengingat di dalam kelas capaian UKBM peserta didik berbeda-beda. Namun pada suatu waktu apabila materi yang hendak disampaikan sama maka guru tetap menjelaskan materi di depan kelas secara klasikal.
 - 3) Kegiatan penutup, dalam kegiatan penutup guru memberikan refleksi dengan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, memberikan penguatan hasil diskusi peserta didik, dan diakhiri dengan pembacaan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai

dengan proses pembelajaran pada kurikulum 2013.

2. Hambatan dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo
 - a. Guru kesulitan dalam membagi waktu.
 - b. Kesulitan dalam mengelola kelas karena kelas bersifat heterogen.
 - c. pemahaman peserta didik tentang Sistem Kredit Semester masih rendah yang mengakibatkan kurangnya motivasi peserta didik untuk mengikuti program percepatan.
 3. Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Sidoarjo.

Untuk mengatasi hambatan yang ada guru menggunakan cara yang hampir sama yaitu. Yang pertama untuk mengatasi hambatan waktu karena sering ada kegiatan rapat yaitu dengan memberikan tugas untuk mengerjakan UKBM yang selanjutnya akan di bahas pada pertemuan berikutnya, tetapi jika memang ada waktu dan materi mengharuskan guru untuk menjelaskan maka akan dicarikan jam tambahan untuk mengganti jam yang kosong. Ke dua untuk mengatasi hambatan pengelolaan kelas heterogen yaitu dengan cara mengelompokkan posisi duduk antara peserta didik reguler dengan PDCB di pisah, hal ini untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Ke tiga untuk mengatasi kurangnya motivasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan beban belajar lebih cepat berbeda antara Miko dan Isa. Pak miko menggunakan pendekatan memberikan motivasi di sela-sela jam pelajaran, sedangkan Bu Isa lebih memilih menggunakan pendekatan layanan individual sehingga Bu Isa mendekati peserta didik yang dinilai memiliki potensi untuk cepat belajar untuk diberi arahan agar peserta didik memiliki motivasi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan diatas, maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut :

- (1) Bagi Sekolah, lebih ditingkatkan lagi sosialisasi terkait program-program Sistem Kredit Semester, sehingga seluruh warga sekolah memahami program-program tersebut, terutama peserta didik karena peserta didik adalah objek di dalam implementasi SKS jadi peserta didik harus benar-benar memahami apa itu Sistem Kredit Semester. Pemahaman ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu atau bisa juga melalui

perantara guru ketika mengajar di kelas, jadi sambil mengajar di sisipi informasi tentang Sistem Kredit Semester. (2) Bagi Kepala Sekolah, sebaiknya selalu mengevaluasi dan mensupervisi guru dengan mengadakan rapat secara rutin dengan Bapak/Ibu guru agar kepala sekolah mengetahui hambatan-hambatan yang ada di lapangan karena setiap guru mempunyai permasalahan yang berbeda sehingga dengan adanya rapat akan menemukan solusi dari setiap permasalahan. Selain itu sebaiknya kepala sekolah mengevaluasi apakah kegiatan pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam pedoman penyelenggaraan SKS dan RPP. (3) Bagi Guru Mata Pelajaran, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi pemahaman tentang Sistem Kredit Semester dengan mengikuti seminar-seminar dan workshop agar pengetahuan lebih mumpuni serta rutin mengadakan rapat MGMP untuk memaksimalkan perangkat dan proses sehingga sosialisasi perlu pembelajaran kepada peserta didik dapat menjadi lebih baik lagi. Selain itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di perbaiki lagi agar sesuai dengan RPP dan pelayanan individual peserta didik dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aunurrahman. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

BSNP. 2010. *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Jakarta:BSNP.

Lamidjan. 2015. *Konstruktivisme dalam pembelajaran*. <http://umk.ac.id/files/2.04.%20konstruktivisme%20Odlm%20pembelajaran%20LAM.ppt> diakses tanggal 15 Januari 2019

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional